

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik telah mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan umum mulai pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGN yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik.

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam Perang Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang ketangan sekutu, dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajahan Belanda maka dikeluarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda, dan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda.

Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surutnya perjuangan bangsa, pada tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai hari listrik dan gas. Hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1946 bertempat di gedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP), Yogyakarta. Penempatan secara resmi tahun 1945 sebagai hari listrik dan gas berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum dan tenaga No. 20 tahun 1960, namun kemudian berdasarkan keputusan

menteri pekerjaan umum dan tenaga listrik No. 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 1975 peringatan hari listrik dan gas di gabung dengan hari kebangkitan pekerjaan umum dan tenaga listrik yang jatuh pada tanggal 03 Desember.

Mengingat pentingnya dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan keputusan menteri pertambangan dan energi No.134/43.PE/1992 pada tanggal 31 Agustus 1992 di tetapkanlah bahwa tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional. Secara garis besar sejarah perkembangan PLN berdasarkan pembagian-pembagian kurun waktu tertentu dapat dibagi kedalam enam periode, yaitu:

a. Periode Sebelum Tahun 1943

Perusahaan kelistrikan Indonesia dirintis oleh perusahaan-perusahaan swasta Belanda, yaitu oleh pabrik-pabrik pengusaha kelistrikan untuk umum yang dinilai menguntungkan, maka bermunculah perusahaan-perusahaan listrik swasta milik Belanda seperti:

- a) NV ANIFM
- b) NV GRBRO
- c) NV OGRML

b. Periode Tahun 1943-1945

Pada waktu pendudukan Jepang perusahaan-perusahaan listrik swasta tersebut di kuasai secara keseluruhan oleh Jepang dan dikelola menurut situasi suatu kondisi suatu daerah-daerah tertentu seperti perusahaan listrik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra dan lain-lain.

c. Periode Tahun 1945-1966

Perusahaan listrik dan gas di sebut dari Jepang dan melalui ketetapan Presiden RI. No. 1/Sd/1945 Tanggal 27 Oktober 1945, dibentuk jawatan listrik dan gas yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada masa Agresi Belanda ke 1, perusahaan- perusahaan listrik yang di bentuk dengan ketetapan Presiden diatas, dikuasai kembali oleh pemiliknya semula. Pada Agresi Belanda ke-2 (19 Desember1948). Sebagianbesar kantor-kantor jawatan listrik dan gas di rebut oleh pemerintah kolonial Belanda, kecuali daerah Aceh. Tahun 1950 jawatan listrik dan gas di ubah menjadi listrik dan gas milik pemerintah Colonial Belanda, sedangkan perusahaan listrik swasta di

serahkan kembali kepada pemiliknya semula hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Berdasarkan keputusan Presiden No. 163. 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan listrik Milik Bangsa Belanda yaitu jika konsesi perusahaan telah berakhir, maka beberapa perusahaan listrik milik swasta tersebut diambil dan di gabungkan ke jawatan tenaga. Di ubah menjadi perusahaan Listrik Negara melalui surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. P.25/45/17 Tanggal 23 September 1959 setelah Dewan Direktur Perusahaan Listrik (DD. PLN) terbentuk. Berdasarkan undang-undang No.19 Tahun 1996 tentang “Perusahaan Negara” dan melalui peraturan pemerintah RI (Republik Indonesia) No. 67 tahun 1961 di bentuklah Badan Pimpinan Umum perusahaan listrik Negara (BPU-PLN), yang mengelola semua perusahaan listrik dan gas, dan berada didalam satu wadah organisasi.

d. Periode Tahun 1967 – 1985

Dalam kabinet Pembangunan I, PLN dan Lembaga Masalah Ketenagaan (LMK) di alihkan ke departemen PUTL No.6/PRT/1970. Tahun 1972, PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum melalui peraturan pemerintah No.18. Pemerintah juga memberikan tugas-tugas pemerintah dibidang kelistrikan kepada PLN untuk mengatur, membina, mengawasi dan melaksanakan perencanaan umum di bidang kelistrikan nasional disamping tugas-tugas sebagian perusahaan. Mengingat kebijaksanaan energi perlu untuk di tetapkan secara nasional, maka kabinet Pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan dan Energi, dan PLN serta PGN berpindah lingkungan dari Departemen PUTL ke Departemen Pertambangan di bidang ketenagaan selanjutnya ditangani oleh direktorat jenderal ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, Ditjen ketenagaan diubah menjadi Ditjen Listrik Energi Baru (LEB). Perubahan nama ini untuk memperjelas tugas dan fungsinya yaitu:

- a) Pembinaan program kelistrikan
- b) Pembinaan perusahaan Kelistrikan
- c) Pengembangan energi baru

Terlihat bahwa tugas-tugas pemerintah yang semula dipikul oleh PLN (secara bertahap dikembalikan ke departemen). Sehingga PLN dapat lebih memuaskan fungsinya sebagai perusahaan.

e. Periode Tahun 1985 sampai sekarang

Mengingat tenaga listrik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara umum serta untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat secara khusus, dan oleh karena itu usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaanya perlu ditingkatkan agar tersedia tenaga tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata dengan mutu pelayanan yang baik. Kemudian dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan diperlukan upaya-upaya.

Wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. 1 PT PLN (Persero) ULP Bengkalis
(Sumber: PT PLN (Persero) ULP Bengkalis)

1.2 Visi dan Misi

1.2.1 Visi

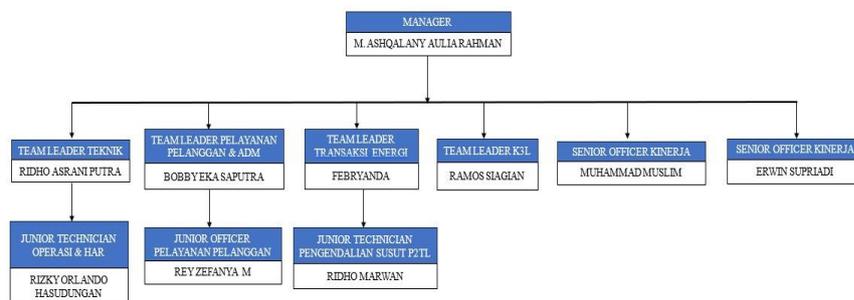
Menjadi Perusahaan Global Top 500 dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.

1.2.2 Misi

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan saham.
2. Menjanjikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi ULP PLN Bengkulu dirancang untuk memastikan pelayanan listrik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Dengan pembagian tugas yang jelas antara manajer, *supervisor*, dan staf administratif, ULP Bengkulu dapat menjalankan operasional harian dengan efektif, mendukung visi PLN dalam menyediakan listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Struktur organisasi ULP PLN Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi
(Sumber: PT PLN (Persero) ULP Bengkulu, 2025)

Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi dan penjelasan tugas masing-masing posisi:

1. *Manager* ULP

- 1) Menyusun kebijakan teknis berdasarkan target perusahaan.
- 2) Menganalisis sasaran kerja rayon berdasarkan target perusahaan.
- 3) Memberi petunjuk pada *Supervisor* administrasi dan *Supervisor* Teknik.

- 4) Mengawasi dan mengevaluasi laporan-laporan terkait pelayanan pelanggan.
2. *Supervisor* Layanan Pelanggan dan Administrasi
 - 1) Mengelola informasi dan saran terkait instalasi baru, perubahan daya, dan pelayanan lainnya.
 - 2) Mengendalikan pelayanan instalasi baru, perubahan daya, sambungan sementara, perubahan tarif, dan keluhan pelanggan.
 - 3) Memeriksa bukti pembayaran terkait pelaksanaan pelayanan.
 - 4) Bertanggung jawab menerima pembayaran biaya penyambungan.
 3. *Supervisor* Teknik (SPV Teknik)
 - 1) Memantau dan mengelola operasional jaringan distribusi tenaga listrik untuk memastikan keandalan pasokan energi kepada pelanggan.
 - 2) Melaksanakan pemeliharaan rutin dan perbaikan terhadap infrastruktur jaringan distribusi untuk mencegah gangguan.
 - 3) Memantau indikator kinerja seperti SAIDI (*System Average Interruption Duration Index*) dan SAIFI (*System Average Interruption Frequency Index*) untuk menilai keandalan sistem.
 4. *Supervisor* Transaksi Energi (SPV TE)
 - 1) Mengkoordinasikan proses penagihan (*billing*) dan penyelesaian transaksi energi listrik untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar operasional.
 - 2) Memantau kegiatan pembacaan meter, termasuk penggunaan teknologi *Automatic Meter Reading* (AMR), serta memastikan akurasi pengukuran energi.
 - 3) Mengevaluasi data penyaluran energi untuk *settlement* antar unit pelaksana dan Unit Pelaksana Teknik (UPT), termasuk pengelolaan *transfer price* energi.
 - 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) secara rutin untuk mengurangi kehilangan energi dan memastikan kepatuhan pelanggan.
 5. *Supervisor* K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan)

- 1) Mengidentifikasi dan mengelola potensi bahaya di tempat kerja untuk mencegah kecelakaan dan memastikan keselamatan pegawai.
- 2) Melaksanakan program kesehatan untuk menjaga kondisi fisik dan mental pegawai agar tetap produktif dan sehat.
- 3) Mengawasi dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasional, termasuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 4) Memberikan perlindungan terhadap terjadinya gangguan dan kerusakan yang dapat menghambat operasional instansi.

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan

ULP Bengkalis memiliki ruang lingkup kerja yang sangat penting dan luas dalam memastikan tersedianya pasokan tenaga listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Pulau Bengkalis dan sekitarnya. Tugas utama ULP ini mencakup penyediaan dan distribusi listrik kepada pelanggan rumah tangga, usaha, industri, dan sektor publik, dengan sistem kelistrikan yang pada umumnya masih terisolasi, bergantung pada pembangkit lokal seperti PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) Pangkalan Batang. Dengan kapasitas daya sekitar 20 MW namun keandalan sistem tetap menjadi prioritas utama. Sebagai upaya peningkatan infrastruktur, PLN juga sedang berproses untuk menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Bengkalis dengan jaringan dari Pulau Sumatera melalui pembangunan kabel laut guna mengurangi ketergantungan pada diesel dan meningkatkan efisiensi distribusi listrik.

Dalam hal operasional, ULP Bengkalis juga bertanggung jawab melakukan pemeliharaan dan perbaikan berkala terhadap infrastruktur kelistrikan, termasuk jaringan distribusi, gardu induk, dan instalasi pelanggan, guna meminimalisir gangguan dan meningkatkan keandalan sistem. Pemadaman bergilir kadang diberlakukan sebagai bentuk perawatan sistem secara terencana. Di sisi lain, unit ini memiliki divisi pelayanan pelanggan yang menangani berbagai urusan administrasi seperti pemasangan baru, perubahan daya, pencatatan meter, penagihan, pengendalian piutang, hingga pengelolaan keluhan pelanggan secara

cepat dan profesional. Dalam konteks sosial, ULP Bengkulu juga menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan, seperti mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses listrik untuk petani dan sektor produktif lainnya. Selain itu, ULP Bengkulu aktif menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk menyelaraskan perencanaan kelistrikan dengan program pembangunan daerah.

Tak kalah penting, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) juga menjadi bagian integral dari ruang lingkup kerja ULP Bengkulu. Unit ini menerapkan standar tinggi dalam upaya menjaga keselamatan tenaga kerja dan masyarakat, termasuk melakukan pelatihan serta simulasi secara berkala untuk memastikan kesiapan menghadapi kondisi darurat. Seluruh kegiatan operasional dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan guna mencegah pencemaran dan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan lingkup kerja yang luas dan kompleks tersebut, PT PLN (Persero) ULP Bengkulu tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai mitra pembangunan daerah yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah.